

BAB II

STUDI PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal, yaitu pemilik atau pemegang saham, dan agen, yakni manajer atau eksekutif perusahaan. Dalam hubungan ini, prinsipal memberikan kewenangan kepada agen untuk mengambil keputusan atas nama mereka. Teori ini muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara kedua pihak, yang dapat menimbulkan konflik keagenan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat agar agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal.

Teori agensi merupakan dasar dalam memahami isu *corporate governance* dan *earning management*, karena teori ini menyoroti hubungan asimetri antara pemilik dan pengelola. Ketidakseimbangan ini dapat diminimalisir melalui penerapan *good corporate governance*, yang bertujuan menjadikan perusahaan lebih sehat dan transparan. Penerapan *corporate governance* sendiri berlandaskan pada teori agensi, di mana hubungan antara manajemen sebagai agen dan pemilik sebagai *principal* menjadi fokus utama. Dalam hal ini, manajemen memiliki tanggung jawab moral untuk mengoptimalkan keuntungan pemilik, sementara sebagai imbalannya, mereka akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak yang disepakati (Margaret & Daljono, 2023).

Teori keagenan berasumsi bahwa perbedaan tujuan antara *principal* dan

agen dapat memicu konflik kepentingan, terutama karena manajer cenderung mengejar kepentingan pribadi. Hal ini menyebabkan mereka lebih fokus pada proyek dan investasi yang menghasilkan laba tinggi dalam jangka pendek daripada memaksimalkan kesejahteraan pemegang saham melalui investasi jangka panjang. Akibatnya, strategi manajerial sering kali tidak selaras dengan kepentingan pemegang saham, yang dapat merugikan perusahaan dalam jangka panjang (Zulfajrin et al., 2022). Oleh karena itu, teori agensi digunakan untuk menganalisis serta mencari solusi atas permasalahan yang muncul dalam hubungan antara manajemen dan pemegang saham.

2.1.2 Kinerja Keuangan

Menurut Irawan et al (2023), setiap perusahaan berupaya mengejar keuntungan maksimal dalam menjalankan bisnisnya. Keberhasilan dalam mencapai tujuan tersebut mencerminkan kemampuan perusahaan yang baik. Sebaliknya, perusahaan yang belum mencapai targetnya perlu melakukan analisis kinerja keuangan secara mendalam. Dengan analisis tersebut, perusahaan dapat mengambil langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keuangannya.

Kinerja keuangan merupakan gambaran keefektifan suatu perusahaan yang dapat dilihat dari hasil yang dicapai melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Analisis kinerja keuangan dirancang untuk menilai seberapa baik perusahaan telah mematuhi aturan dan standar yang berlaku. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, seperti *profitabilitas*, *likuiditas*, dan efisiensi operasional. Dengan analisis yang tepat, perusahaan dapat mengidentifikasi kelemahan serta peluang perbaikan untuk meningkatkan kinerja keuangannya (Daryatno, 2022).

Kinerja keuangan merupakan hasil atau pencapaian yang telah diraih oleh manajemen perusahaan dalam mengelola asetnya secara efektif selama periode tertentu. Evaluasi kinerja keuangan sangat penting bagi perusahaan untuk memahami tingkat keberhasilannya dalam menjalankan aktivitas keuangan. Dengan menilai kinerja keuangan, perusahaan dapat mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan dalam pengelolaan keuangan mereka. Selain itu, informasi ini juga membantu dalam pengambilan keputusan strategis guna meningkatkan pertumbuhan dan stabilitas perusahaan di masa depan (Nasution et al., 2024).

Kinerja keuangan mencerminkan efektivitas perusahaan dalam menjalankan operasionalnya sesuai dengan perencanaan strategi yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan sejauh mana perusahaan berhasil mencapai tujuan, sasaran, misi, dan visi organisasi yang telah dirancang. Evaluasi kinerja keuangan menjadi penting untuk menilai keberhasilan pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan. Dengan demikian, kinerja keuangan dapat dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan strategis demi keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan (Daryatno, 2022).

Uraian di atas, dapat disimpulkan kinerja keuangan merupakan gambaran suatu usaha perusahaan selama periode tertentu. Kinerja keuangan mencerminkan bagaimana perusahaan mengelola dan menghimpun dana untuk menjalankan operasionalnya. Selain itu, kinerja keuangan juga berperan dalam menilai efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya perusahaan. Dengan demikian, kinerja keuangan memiliki hubungan erat dengan kekuatan perusahaan dalam menghadapi tantangan bisnis (Nasution et al., 2024).

Penelitian Irawan et al (2023) menyatakan bahwa kinerja perusahaan dapat mencerminkan hasil dari evaluasi pekerjaan yang telah diselesaikan. Hasil evaluasi tersebut kemudian dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menilai efektivitas pencapaiannya. Setiap aktivitas yang diselesaikan memerlukan evaluasi atau pengukuran berkala guna memastikan kesesuaian dengan standar yang berlaku. Dengan demikian, evaluasi berkala menjadi elemen penting dalam menilai dan meningkatkan kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Beberapa tujuan kinerja keuangan dalam perusahaan (Indarwati & Nur, 2023) adalah sebagai berikut :

1. Untuk dapat menentukan tingkat *rentabilitas* atau probabilitas.

Memahami keuntungan atau pengembalian bisnis, perusahaan dapat menilai sejauh mana efektivitas strategi yang diterapkan dalam menghasilkan *profit*. Hal ini juga membantu perusahaan dalam mengukur stabilitas keuangan serta daya saing di pasar. Selain itu, informasi mengenai keuntungan memungkinkan perusahaan untuk merencanakan investasi dan ekspansi bisnis secara lebih terarah. Dengan demikian, perusahaan dapat menunjukkan kemampuannya dalam memperoleh keuntungan yang berkelanjutan dalam jangka waktu tertentu.

2. Untuk mengetahui tingkat likuiditas.

Mengetahui tingkat *likuiditas*, perusahaan dapat menilai kemampuannya dalam memenuhi kewajiban keuangan tepat waktu. *Likuiditas* yang baik menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset lancar yang cukup untuk menutup utang jangka pendek. Sebaliknya, *likuiditas* yang rendah dapat menjadi tanda

risiko keuangan yang perlu segera diatasi. Oleh karena itu, pemantauan likuiditas sangat penting untuk menjaga stabilitas dan kelangsungan operasional perusahaan.

3. Untuk mengetahui tingkat *solvabilitas*

Mengetahui tingkat *solvabilitas*, perusahaan dapat mengukur kemampuannya dalam memenuhi seluruh kewajiban, baik jangka pendek maupun jangka panjang. *Solvabilitas* yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan memiliki aset yang cukup untuk menutupi seluruh utangnya. Sebaliknya, *solvabilitas* yang rendah dapat menjadi indikasi risiko keuangan yang perlu segera ditangani. Oleh karena itu, analisis *solvabilitas* sangat penting untuk memastikan stabilitas dan keberlanjutan operasional perusahaan.

4. Untuk mengetahui tingkat stabilitas usaha

Mengetahui tingkat stabilitas usaha, perusahaan dapat menentukan kemampuannya dalam mempertahankan atau menjalankan bisnis dalam jangka panjang tanpa menimbulkan kerugian. Stabilitas ini dapat diukur dengan memeriksa kemampuan perusahaan dalam membayar beban bunga atas hutang-hutangnya. Untuk memahami kondisi keuangan, setiap perusahaan wajib membuat laporan keuangan yang mencerminkan kinerja bisnisnya. Laporan keuangan ini berisi informasi penting mengenai kondisi finansial perusahaan dan bermanfaat bagi pihak lain serta pemangku kepentingan dalam menganalisis kinerja keuangan perusahaan (Nasution et al., 2024).

Rasio keuangan merupakan perhitungan yang dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan untuk menilai kondisi keuangan serta kinerja suatu perusahaan (Prima & Harimurty, 2024). Rasio ini berfungsi sebagai alat

ukur dalam menganalisis neraca perusahaan untuk memahami aspek keuangan secara lebih mendalam. Selain itu, rasio keuangan juga mewakili hubungan atau perbandingan antara satu kuantitas dengan kuantitas lainnya guna mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai stabilitas perusahaan. Pengukuran ini dilakukan dengan menggunakan alat analisis berupa rasio keuangan yang membantu dalam pengambilan keputusan bisnis

Untuk dapat mengukur kinerja keuangan pada penelitian ini dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

2.1.3 Dewan Perusahaan

Dewan perusahaan merupakan sekelompok individu yang dipilih oleh pemegang saham untuk mewakili kepentingan perusahaan serta memastikan bahwa manajemen bertindak atas nama mereka (Yulianti & Cahyonowati, 2023). Mereka berperan dalam menetapkan kebijakan bagi manajemen serta melakukan pengawasan perusahaan melalui pertemuan berkala. Selain perusahaan publik, beberapa organisasi swasta dan nirlaba juga memiliki dewan perusahaan karena perannya dalam *corporate governance* yang membantu mengurangi *agency problem* antara pemilik dan manajer (Sartono, 2021). Selain itu, direktur dalam perusahaan diangkat dan diberhentikan melalui persetujuan RUPS, kemudian dilaporkan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk dicatatkan dalam daftar wajib perusahaan.

Direktur memiliki tanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat

kegagalannya dalam menjalankan kepengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, anggaran dasar, kebijakan perusahaan yang tepat, serta ketentuan dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2022 tentang Perseroan Terbatas. Jika terjadi kerugian dalam perseroan, maka direktur wajib menanggungnya dan dapat dimintai pertanggungjawaban baik secara perdata maupun pidana. Namun, apabila kerugian tersebut terjadi akibat risiko bisnis yang wajar, dan direktur telah menjalankan kepengurusan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka direktur tidak dapat dipersalahkan atas kerugian tersebut. Dengan demikian, tanggung jawab direktur sangat bergantung pada kesesuaian tindakannya dengan aturan yang telah ditetapkan.

1. Dewan Direksi

Dewan direksi adalah pihak dalam suatu entitas perusahaan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi dan kepengurusan perusahaan. Pengangkatan dan pemecatan anggota dewan direksi, penentuan besar penghasilan mereka, serta pembagian tugas dilakukan dalam rapat umum pemegang saham. Ukuran dewan direksi ditentukan berdasarkan jumlah anggota yang ada dalam perusahaan. Selain itu, dewan direksi memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya tujuan yang telah ditetapkan (Yadnyapawita & Dewi, 2021).

Dewan direksi memiliki tanggung jawab utama dalam menjalankan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris. Selain itu, mereka juga bertugas untuk menjaga struktur organisasi agar tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Dewan direksi harus memastikan bahwa proses pendelegasian wewenang dilakukan secara efektif demi

kelancaran operasional perusahaan. Semua fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi telah diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan,
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian (manajer),
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan,
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

Menurut Karina & Santy (2021) dewan direksi perusahaan dapat diukur dengan menggunakan:

$DD = \text{Jumlah Anggota Dewan Direksi Di Perusahaan}$
--

2. Rapat Dewan Direksi

Rapat dewan perusahaan merupakan bentuk monitoring langsung terhadap kinerja perusahaan guna meningkatkan nilai perusahaan. Dalam rapat ini, dewan perusahaan menjalankan fungsi pengawasan untuk menyelaraskan kepentingan pemegang saham dengan strategi bisnis yang dijalankan. Selain itu, rapat dewan juga berperan dalam mengevaluasi kebijakan manajemen serta memastikan transparansi dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian, rapat dewan memiliki peran krusial dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang efektif dan berkelanjutan (Julian et al., 2021).

Menurut Deniza et al (2023) banyaknya pertemuan rapat yang dilakukan oleh dewan perusahaan dapat meningkatkan keefektifan kinerjanya karena

mempermudah koordinasi dalam membahas permasalahan atau kondisi perusahaan saat ini. Dengan adanya rapat rutin, dewan perusahaan dapat menjalankan tugasnya untuk memastikan bahwa direktur dan manajemen bekerja dengan baik sesuai kepentingan pemegang saham. Selain itu, rapat yang teratur juga berkontribusi pada pemantauan manajemen yang lebih efektif, sehingga mendorong manajer untuk bekerja sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Pada akhirnya, peningkatan fungsi pengawasan ini akan berdampak positif terhadap nilai perusahaan.

Menurut Deniza et al (2023) rapat dewan dapat diukur dengan menggunakan:

$RP = \frac{\text{Jumlah Rapat Dewan Direksi Perusahaan Yang Dilaksanakan Dalam 1 Tahun}}{\text{Jumlah Saham yang Dimiliki oleh Pemegang Saham}}$

2.1.4 Struktur Kepemilikan

Struktur kepemilikan (*ownership structure*) merupakan perbandingan jumlah saham yang dimiliki oleh orang dalam (*insider*) dengan jumlah saham yang dimiliki oleh investor investor (Anggreni & Robiyanto, 2021). Menurut Rahmadi & Wahyudi (2021) struktur kepemilikan berperan dalam meminimalisir masalah hubungan keagenan, karena dapat memengaruhi operasional perusahaan serta proses pengawasan terhadap manajemen Menurut Maulana et al (2021), struktur kepemilikan terdiri dari kepemilikan pihak dalam, seperti kepemilikan manajerial, serta kepemilikan pihak luar, seperti kepemilikan institusional dan publik. Dalam penelitian ini, struktur kepemilikan yang digunakan mencakup kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, kepemilikan publik, dan

kepemilikan asing.

1. **Kepemilikan Manajerial**

Kepemilikan manajerial merujuk pada kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen yang turut serta dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Berdasarkan *stakeholder theory*, manajemen tidak hanya berperan dalam menjalankan perusahaan, tetapi juga sebagai pemegang saham yang memiliki keterkaitan langsung dengan pemangku kepentingan. Kepemilikan ini menjadi salah satu faktor yang dapat dipengaruhi oleh kinerja perusahaan, di mana semakin besar kepemilikan manajerial, semakin baik pula kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, peningkatan kepemilikan manajerial dapat memotivasi pemimpin untuk lebih optimal dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Nurmayanti & Shanti, 2023).

Struktur kepemilikan manajerial dapat dijelaskan melalui dua pendekatan utama, yaitu pendekatan keagenan dan pendekatan ketidakseimbangan. Pendekatan keagenan berfokus pada hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dengan pihak manajemen. Sementara itu, pendekatan ketidakseimbangan menyoroti mekanisme struktur kepemilikan manajerial yang bertujuan untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara orang dalam (*insider*) dan orang luar (*outsider*). Hal ini dilakukan melalui pengungkapan informasi di dalam perusahaan agar transparansi lebih terjaga (Suparlan, 2023).

Kepemilikan manajerial dalam suatu perusahaan, nilai perusahaan cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya aset yang dikelola oleh manajemen. Kepemilikan ini mendorong manajemen untuk bertindak lebih

optimal dalam mengelola sumber daya perusahaan demi kepentingan pemegang saham. Namun, jika agen yang ditunjuk oleh principal tidak bertindak sesuai dengan tujuan pemegang saham, maka dapat timbul konflik kepentingan yang dikenal sebagai masalah keagenan. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme pengawasan dan insentif yang tepat agar manajemen tetap selaras dengan kepentingan pemilik perusahaan.

Kepemilikan manajerial berperan dalam menilai manfaat yang diperoleh manajemen dalam mekanisme pengurangan konflik *agensi* (Sintyawati & Dewi, 2018). Kepemilikan ini dapat diukur melalui persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar. Semakin besar persentase kepemilikan manajerial, semakin tinggi insentif bagi manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, kepemilikan manajerial dapat menjadi alat efektif dalam mengurangi konflik kepentingan antara manajemen dan pemegang saham dirumuskan sebagai berikut:

$KMJ = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Manajerial}}{\text{Total Saham yang Beredar}}$
--

2. Kepemilikan Institusional

Institusional adalah pemilik suatu perusahaan publik yang berbentuk lembaga, bukan perseorangan atau pribadi. Sebagian besar institusi berbentuk perseroan terbatas (PT). Biasanya, PT ini dimiliki oleh pendiri perusahaan atau kerabatnya. Kepemilikan institusional memberikan stabilitas dalam pengelolaan perusahaan (Izzatilla, 2021).

Menurut Selly & Yuniarti (2021) kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan dari suatu institusi atau lembaga, seperti pemerintah dan institusi keuangan. Kepemilikan ini dapat berperan dalam menciptakan stabilitas dalam manajemen perusahaan karena adanya pengawasan dari pihak institusional. Selain itu, kepemilikan institusional juga dapat meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam pengambilan keputusan perusahaan. Dengan demikian, kepemilikan institusional dapat digunakan untuk mengurangi konflik kepentingan yang mungkin timbul antara manajemen dan pemegang saham lainnya.

Struktur kepemilikan institusional berperan penting dalam mengawasi manajemen perusahaan. Dalam konteks ini, kepemilikan institusional tidak hanya bertindak sebagai pemegang saham mayoritas, tetapi juga memiliki pengaruh besar dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan oleh sifatnya yang dominan di antara para pemegang saham, sehingga dapat menentukan arah kebijakan perusahaan. Selain itu, kepemilikan institusional juga memberikan wewenang kepada manajemen dalam pengelolaan keuangan perusahaan secara lebih efektif (Deniza et al., 2023).

Kepemilikan institusional memiliki peran penting dalam memonitor manajemen karena dapat mendorong peningkatan pengawasan yang optimal. Pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional berkontribusi dalam menjamin kemakmuran para pemegang saham. Pengaruh kepemilikan institusional sebagai pengawas semakin diperkuat melalui investasi mereka yang signifikan di pasar modal (Maulana et al., 2021). Kepemilikan institusional

mempunyai kelebihan antara lain :

- a. Memiliki profesionalisme dalam menganalisis informasi sehingga dapat menguji keandalan informasi.
- b. Memiliki motivasi yang kuat untuk melaksanakan pengawasan lebih ketat atas aktivitas yang terjadi di dalam perusahaan.

Menurut Izzatilla (2021) kepemilikan institusional dapat diukur dengan menggunakan indikator persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak institusi dibandingkan dengan total modal saham yang beredar. Semakin besar persentase kepemilikan institusional, semakin kuat pengaruh institusi dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa institusi memiliki peran penting dalam pengawasan serta tata kelola perusahaan. Adapun rumusan perhitungan kepemilikan institusional dapat dinyatakan sebagai berikut:

$KIN = \frac{\text{Jumlah Saham Kepemilikan Institusional}}{\text{Total Modal Saham yang Beredar}}$

2.1.5 Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok individu yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk menjalankan tugas tertentu dalam organisasi. Mereka memiliki peran penting dalam mengawasi proses audit dan memastikan transparansi serta akuntabilitas keuangan. Selain itu, klien juga bertanggung jawab untuk mendukung auditor dalam menjaga independensinya dari pengaruh manajemen. Dengan demikian, komite audit dan klien memiliki peran yang saling mendukung dalam menjaga integritas laporan keuangan (Rakhel et al., 2021).

Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan OJK 55/2022, komite audit memiliki

tanggung jawab kepada dewan perusahaan dalam membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya. Selain itu, komite audit juga berperan dalam memastikan efektivitas pengawasan internal perusahaan. Anggota komite audit diangkat dari anggota direksi yang memiliki kompetensi di bidangnya. Selain itu, komite ini bertanggung jawab dalam mendukung pembentukan auditor independen guna memastikan transparansi dan akuntabilitas keuangan perusahaan.

Berdasarkan penafsiran tersebut, dapat disimpulkan bahwa komite audit merupakan kelompok independen yang ditunjuk secara khusus dan memiliki visi terhadap sistem pengendalian internal perusahaan. Peran komite audit sangatlah penting dalam mendukung penerapan *good corporate governance* di dalam suatu perusahaan. Selain itu, efektivitas komite audit dalam mengawasi pengelolaan keuangan menjadi faktor utama dalam menjaga transparansi dan akurasi laporan keuangan. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang profesional dan kompeten akan mendorong terciptanya laporan keuangan yang dapat dipercaya (Solikhah & Suryandani, 2021).

Komite audit wajib berfungsi secara mandiri, di mana auditor perusahaan berperan sebagai penghubung antara auditor *eksternal* dan perusahaan serta dapat bekerja sama dengan fungsi pengawasan dewan perusahaan. Untuk mendukung efektivitasnya, perlu diberikan insentif bagi fungsi auditor *internal*. Komite audit sendiri dibentuk oleh dewan perusahaan dan memiliki tanggung jawab langsung kepada perusahaan. Selain itu, komite audit juga berperan dalam memastikan kinerja pengurusan perusahaan serta pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Peraturan mengenai pembentukan komite audit diatur oleh Bapepam melalui Surat Edaran No. SE-03/PM/2000, yang merekomendasikan agar setiap emiten dan perusahaan publik memiliki komite audit. Komite audit harus terdiri dari minimal tiga orang, dengan salah satunya merupakan anggota dewan perusahaan yang juga berperan sebagai ketua komite. Ketentuan ini kemudian diperbarui melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam Kep.41/PM/2003, khususnya dalam Peraturan Nomor IX.1.5 yang mengatur tentang pembentukan dan pelaksanaan kerja komite audit.

Menurut Kepmen Nomor 117 Tahun 2021, tujuan pembentukan komite audit adalah untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal serta mendukung tugas auditor dalam menjalankan fungsinya. Keberadaan komite audit dalam laporan keuangan tercermin dalam struktur manajemen perusahaan, yang menunjukkan peran dan tanggung jawabnya. Selain itu, efektivitas komite audit dapat diukur berdasarkan proporsi keanggotaan yang ada dalam perusahaan. Pengukuran ini dilakukan dengan melihat jumlah anggota komite audit serta keterlibatan mereka dalam pengawasan dan evaluasi keuangan.

KA= Jumlah Anggota Komite Audit

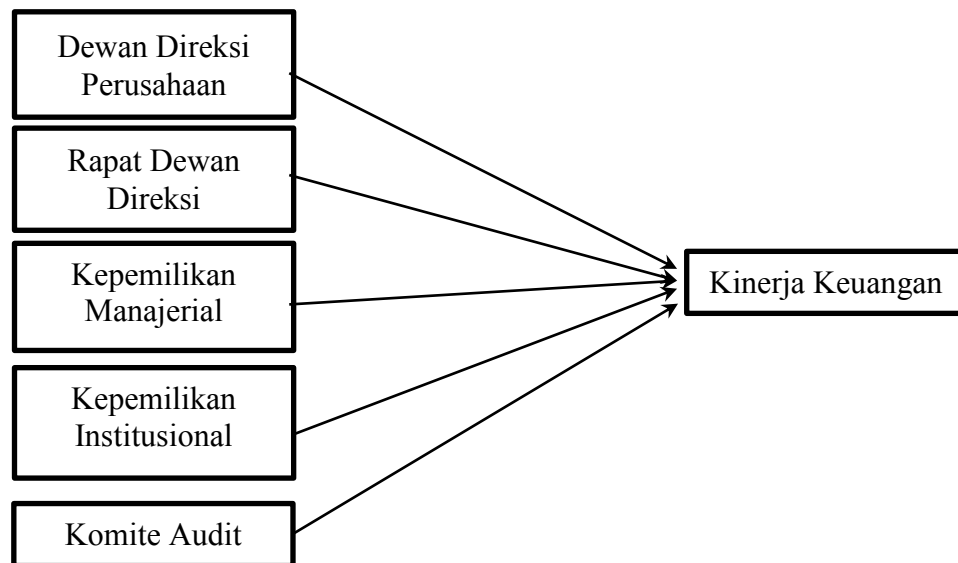
2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
1	Putri & Wuryani (2021)	Pengaruh Modal Kerja, Kepemilikan Manajer Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Kinerja	Modal kerja dan pertumbuhan penjualan berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan Kepemilikan manajerial tidak

No	Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
		Keuangan Pada Perusahaan Yang Tercatat Di Bei Selama Periode 2015-2017	berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
2	Anggreni & Robiyanto (2021)	Pengaruh struktur modal, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan terhadap kinerja keuangan	Struktur modal, likuiditas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan
3	Daryatno (2022)	Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan.	<i>Firm size dan liquidity</i> berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan, <i>tangibility</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan <i>leverage</i> dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
4	Yanti & Darmayanti (2023)	Pengaruh pertumbuhan penjualan, likuiditas, dan risiko bisnis terhadap kinerja keuangan	Pertumbuhan penjualan dan risiko bisnis berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan, sedangkan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.
5	Aprianto (2024)	Pengaruh <i>leverage</i> , likuiditas, <i>firm size</i> , dan <i>sales growth</i> terhadap kinerja keuangan pada Perusahaan LQ45	<i>Leverage</i> berpengaruh negatif signifikan terhadap kinerja keuangan, likuiditas berpengaruh terhadap kinerja keuangan, sedangkan <i>firm size</i> dan <i>sales growth</i> tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan
6	Firdaus & Dewayanto (2024)	Pengaruh Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Kinerja Keuangan (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Pada Tahun 2020-2022)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Kemudian, independensi dewan tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Kepemilikan institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

2.3 Kerangka Pemikiran



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

2.4 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan gambaran mengenai struktur penelitian yang menjelaskan variabel atau sub-variabel dalam konsep, indikator, dan ukuran yang bertujuan untuk memperoleh nilai variabel. Selain itu, operasional variabel diperlukan untuk menentukan skala pengukuran masing-masing variabel agar pengujian hipotesis dengan alat bantu dapat dilakukan secara tepat. Lebih lanjut, operasional variabel juga berfungsi untuk menentukan jenis serta indikator dari variabel-variabel yang terkait dalam penelitian. Adapun operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
Kinerja keuangan perusahaan (Nasution et al., 2024)	Kinerja keuangan merupakan gambaran tentang kondisi keuangan perusahaan yang dianalisis dengan alat-alat analisis keuangan yang dapat	$ROA = \text{Laba bersih} / \text{total aset}$	Rasio

Variabel	Definisi	Pengukuran	Skala
	disajikan sumber daya.		
Dewan direksi (Yadnyapawita & Dewi, 2021)	Merupakan organ perusahaan yang menentukan kebijakan strategi yang diambil oleh perusahaan baik kebijakan atau strategi jangka panjang maupun jangka pendek.	DD = Jumlah anggota dewan direksi di perusahaan	Rasio
Rapat dewan (Deniza et al., 2023)	Rapat dewan perusahaan dapat digambarkan sebagai bentuk <i>monitoring</i> secara langsung terhadap kinerja perusahaan untuk meningkatkan nilai perusahaan	RP = Jumlah rapat dewan direksi yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Rasio
Kepemilikan manajerial (Ahmad & Rasyid, 2024)	Merupakan pemilik saham perusahaan yang berasal dari manajemen yang ikut serta dalam pengambilan keputusan suatu perusahaan yang bersangkutan.	KMJ= Jumlah saham manajerial	Rasio
Kepemilikan institusional (Izzatilla, 2021)	Merupakan sebuah kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan dari sebuah institusi atau lembaga lain.	KIN= Jumlah saham institusional	Rasio
Komite audit (Solikhah, 2021)	Merupakan sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota dewan direksi perusahaan klien bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan	KA= Jumlah anggota komite audit	Rasio

2.5 Hipotesis

2.5.1 Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Hubungan antara dewan direksi dan kinerja keuangan perusahaan telah menjadi fokus penelitian dalam bidang manajemen dan keuangan karena dewan direksi memiliki peran strategis dalam menentukan arah serta kebijakan

perusahaan. Keberagaman dalam dewan direksi, seperti variasi gender, kebangsaan, dan usia, dapat membawa perspektif baru serta mendorong inovasi dalam pengambilan keputusan. Faktor-faktor seperti ukuran dan komposisi dewan direksi juga berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan dan pengambilan keputusan dalam perusahaan. Dengan demikian, struktur dan karakteristik dewan direksi memiliki implikasi signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Teori keagenan (*agency theory*) menjelaskan hubungan antara prinsipal (pemilik perusahaan) dan agen (manajemen) dalam konteks perusahaan, di mana terdapat potensi konflik kepentingan karena agen mungkin tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan terbaik prinsipal. Konflik ini muncul karena perbedaan tujuan dan informasi yang tidak simetris antara kedua pihak, sehingga dapat memengaruhi pengambilan keputusan manajemen. Untuk memitigasi konflik tersebut, diperlukan mekanisme pengawasan seperti dewan direksi dan dewan komisaris independen yang berperan dalam mengawasi kinerja manajemen. Dengan adanya mekanisme ini, diharapkan manajemen dapat bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian mengenai pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan telah menjadi topik yang banyak dibahas dalam literatur keuangan. Penelitian Suryani & Wibowo (2022) yang menunjukkan bahwa struktur dewan direksi yang lebih besar dan beragam dapat meningkatkan pengambilan keputusan yang berdampak positif terhadap profitabilitas perusahaan. Fitria & Rahmawati (2023) yang menekankan pentingnya pengawasan aktif oleh dewan direksi dalam

meningkatkan rasio keuangan, seperti ROE dan ROA, memberikan bukti bahwa pengelolaan yang baik oleh dewan dapat memperbaiki kinerja keuangan. Penelitian Tomi & Nabila (2024) juga menegaskan bahwa keterlibatan dewan direksi dalam pengelolaan perusahaan berhubungan positif dengan kinerja keuangan. Penelitian Sutrisno & Nugroho (2025) mengungkapkan bahwa keberagaman latar belakang anggota dewan direksi sangat berperan dalam meningkatkan pengambilan keputusan yang berdampak pada efisiensi operasional dan laba perusahaan, semakin menegaskan bahwa dewan direksi yang kompeten dan profesional dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan..

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H1: Dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.5.2 Rapat Dewan Direksi terhadap Kinerja Keuangan

Rapat dewan yang merupakan pertemuan rutin antara anggota dewan komisaris dan dewan direksi, berperan penting dalam tata kelola perusahaan. Frekuensi serta efektivitas rapat ini menjadi indikator utama keterlibatan dan pengawasan dewan terhadap manajemen. Melalui mekanisme ini, dewan dapat memastikan bahwa strategi perusahaan berjalan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selain itu, efektivitas pengawasan dalam rapat-rapat tersebut dapat memengaruhi kinerja keuangan perusahaan, termasuk dalam hal *profitabilitas* dan penciptaan nilai bagi pemegang saham.

Perspektif teori agensi, dewan komisaris dan dewan direksi berperan sebagai agen yang mewakili kepentingan prinsipal, yaitu para pemegang saham.

Untuk memastikan manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham, rapat dewan yang efektif menjadi sangat penting. Dengan adanya rapat yang terstruktur dan transparan, pengawasan terhadap keputusan manajemen dapat dilakukan secara optimal. Hal ini dapat membantu mengurangi masalah keagenan dan berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Haryanto & Subroto (2022) mengungkapkan bahwa frekuensi rapat dewan direksi memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, di mana rapat yang lebih sering memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat dalam menghadapi perubahan pasar. Penelitian serupa oleh Widodo & Setiawan (2023) juga menunjukkan bahwa dewan yang lebih aktif dalam rapat dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajer, yang berujung pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian oleh Aulia (2024) menemukan bahwa perusahaan yang mengadakan lebih banyak rapat dewan cenderung memiliki profitabilitas yang lebih baik, karena adanya evaluasi yang lebih intensif terhadap strategi bisnis yang diterapkan. Studi oleh Pratama & Oktaviani (2025) mengonfirmasi bahwa komunikasi yang lebih intensif dalam rapat dewan berperan penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan kinerja finansial perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H2: Jumlah rapat dewan perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan.

2.5.3 Kepemilikan Manajerial Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan manajerial merujuk pada proporsi saham perusahaan yang

dimiliki oleh manajer atau anggota dewan direksi, yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan manajemen dengan pemegang saham lainnya. Dengan keterlibatan manajer sebagai pemegang saham, diharapkan mereka lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta mengelola aset secara efisien. Indikator yang umum digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return on Assets (ROA)* dan *Return on Equity (ROE)*.

Teori agensi, muncul potensi konflik kepentingan antara pemilik (*prinsipal*) dan manajer (agen) akibat perbedaan tujuan serta asimetri informasi. Konflik ini dapat menghambat pengambilan keputusan yang optimal bagi perusahaan. Salah satu mekanisme untuk mengurangi konflik tersebut adalah kepemilikan manajerial, yang memberikan insentif bagi manajer agar bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Dengan demikian, kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan secara keseluruhan.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, studi yang dilakukan oleh Sari & Puspitasari (2022) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, karena adanya keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Fajar & Yuliana (2023) yang menunjukkan bahwa kontrol yang lebih besar oleh manajer atas perusahaan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis yang lebih

efektif, yang berujung pada peningkatan kinerja finansial. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati (2024) menegaskan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperkuat komitmen terhadap tujuan jangka panjang perusahaan, yang berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Penelitian terkini oleh Kurniawan & Hidayat (2025) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak saham yang dimiliki oleh manajer memiliki *rasio return on equity* (ROE) yang lebih tinggi, mencerminkan kinerja keuangan yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.5.4 Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan

Kepemilikan institusional merujuk pada kepemilikan saham suatu perusahaan oleh institusi seperti dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. Kehadiran investor institusional dianggap dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen perusahaan, sehingga berpotensi mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan biasanya diukur melalui berbagai indikator, seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan laba bersih. Dengan adanya pengawasan yang lebih ketat dari investor institusional, diharapkan perusahaan dapat mengelola aset dan modalnya secara lebih efisien.

Pada teori agensi, terdapat hubungan kontraktual antara pemilik (*prinsipal*) dan manajer (*agen*), di mana konflik kepentingan dapat muncul ketika manajer

tidak bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Untuk mengatasi hal ini, kepemilikan institusional yang signifikan dapat berperan sebagai mekanisme pengendalian yang efektif. Investor institusional memiliki insentif serta kemampuan untuk memantau kinerja manajemen secara lebih ketat. Dengan demikian, keberadaan kepemilikan institusional dapat membantu memitigasi konflik kepentingan antara prinsipal dan agen.

Penelitian sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh signifikan antara kepemilikan manajerial dan kinerja keuangan perusahaan. Misalnya studi yang dilakukan oleh Sari & Puspitasari (2022) menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat kepemilikan manajerial yang lebih tinggi cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik, karena adanya keselarasan antara kepentingan manajer dan pemegang saham. Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Fajar & Yuliana (2023) yang menunjukkan bahwa kontrol yang lebih besar oleh manajer atas perusahaan memungkinkan mereka untuk membuat keputusan strategis yang lebih efektif, yang berujung pada peningkatan kinerja finansial. Selain itu, penelitian oleh Rahmawati (2024) menegaskan bahwa kepemilikan manajerial dapat memperkuat komitmen terhadap tujuan jangka panjang perusahaan, yang berkontribusi pada peningkatan profitabilitas. Penelitian terkini oleh Kurniawan & Hidayat (2025) juga mendukung temuan ini dengan menunjukkan bahwa perusahaan yang memiliki lebih banyak saham yang dimiliki oleh manajer memiliki rasio *return on equity* (ROE) yang lebih tinggi, mencerminkan kinerja keuangan yang optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai

berikut:

H4 : kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan

2.5.5 Komite Audit terhadap Kinerja Keuangan

Komite audit merupakan komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk membantu pengawasan proses pelaporan keuangan, pengendalian internal, dan audit perusahaan. Kinerja keuangan mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan serta mengelola sumber daya secara efisien, yang biasanya diukur melalui indikator seperti *Return on Assets (ROA)*, *Return on Equity (ROE)*, dan *Net Profit Margin (NPM)*. Komite audit berperan penting dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Teori agensi menjelaskan hubungan antara *prinsipal* (pemilik atau pemegang saham) dan *agen* (manajemen) dalam sebuah perusahaan, di mana konflik kepentingan dapat muncul ketika manajemen tidak selalu bertindak sesuai dengan kepentingan pemilik. Untuk memitigasi konflik ini, diterapkan mekanisme tata kelola perusahaan, seperti pembentukan komite audit, yang berperan dalam memastikan integritas laporan keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, komite audit dapat mengurangi asimetri informasi serta biaya agensi, yang pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Melalui mekanisme ini, perusahaan diharapkan dapat lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan sumber daya demi kepentingan para pemangku kepentingan.

Beberapa penelitian terkini menunjukkan bahwa komite audit memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Misalnya, dalam penelitian oleh Wijaya & Santoso (2022) ditemukan bahwa komite audit yang aktif dapat meningkatkan pengawasan terhadap laporan keuangan perusahaan, yang berujung pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan. Penelitian serupa oleh Harahap & Ningsih (2023) juga menunjukkan bahwa komite audit yang independen memiliki peran penting dalam mengurangi ketidakpastian keuangan, yang pada gilirannya meningkatkan stabilitas dan kinerja perusahaan.

Penelitian terbaru oleh Sari & Wijay (2025) mengkonfirmasi bahwa perusahaan dengan komite audit yang kuat cenderung memiliki kinerja keuangan yang lebih baik karena adanya peningkatan transparansi dan pengendalian internal yang lebih baik. Temuan-temuan ini memperkuat hipotesis bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H5 : Komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan